

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Baru Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, 3rd Edition*, West Publishing Co. 1993.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Cunningham, W.T., "*Nelson Contemporary English Dictionary*", Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982, hlm. 422
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hadjon, Philipus M. Tatiek Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1
- Hamzah, Andi. "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" dalam *Darwin Prinst*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016.

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES Indonesia, 1985.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Nurdjana, I.G.M. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pramono, B., (2020), *Peradilan Militer di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Samekto, FX Adji. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Purbacaraka, Purnadi, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986.
- Suhariyono, 2009, “*Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*”, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Sumardjono, Maria, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Syarif, Laode & Didik Purwoleksono, *Hukum Anti Korupsi*. Jakarta: The Asian Foundation, 2012.
- Syaukani, Imam & Thohari, A. Ahsan, 2005, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paripurna, Amira, Dkk., “*Tranformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 173.
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wantu, Fence M., (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

B. Jurnal

- Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, 4(2), 2017.

- Badu, Lisnawaty W. & Apripari, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Legalitas*, 12(1), 2019.
- Baswir, Revrisond “Dinamika Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Struktural.” *Jurnal Universitas Paramadina* 2 no. 1 (2017): 27.
- Buaton, Tiarsen, Dkk., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia”, *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 2024.
- Chandra, Septa, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Fiat Justicia*, Volume 8, Nomor 2, April-Juni 2014.
- C., Yulinda Regina, Dkk., “Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(4), 2024.
- Dewi, Vania Oktaviani, & Triadi, Irwan, “Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 2023.
- Edy, Slamet Sarwo, “Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan dalam mengadili Tindak Pidana korupsi Yang Dilakukan Oleh anggota Militer bersama-Sama Dengan Orang Sipil”, *Jurnal Hukum Fortiori*, 4(1), 2024.
- Hakim, Lukman. “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam RKUHP.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 No. 1 (2019): 19.
- Hasan, Dina Maliah, Dkk., “Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?”, *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 2024.
- Helmi, Muhammad Ishar. “Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer”, *Jurnal Cita Hukum* 1 no. 2 (2019): 305.
- Jamaludin, Ahmad, “Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Legal Standing*, 8(2), 2024.
- Laia, Sri Wahyuni & Daliwu, Sodialman, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education dan Development*, 10(1), 2022.

- Leiken, Robert S. "Controlling the Global Corruption Epidemic", *Jurnal Foreign Policy* no. 105 (1996): 55
- Masruroh, Lailatul & Fikri, Abdullah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 2024.
- Muqorobin, Mohammad Khairul & Arief, Barda Nawawi, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 2020.
- Nye, J.S. "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", *Jurnal American Political Science Review* 61 no. 2 (1996): 417.
- Pakasi, Dean Raphael, Dkk., "Penindakan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Lex Privatum*, 14(02), 2024.
- Pakpahan, Novritsar Hasintongan, "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas", *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, 1(2), 2022.
- Ramadhana, Kurnia, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5(2), 2019.
- Ridlo, Ali, Dkk., "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer", *Paraguayuang Law Journal*, 8(1), 2024.
- Rumate, Priska V.O., Dkk., "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer", *Jurnal Lex Administratum*, 11(1), 2023.
- Tanzi, Vito. "Corruption, Government Activities and Markets", *IMF Working Paper* 099, (Desember 1995): 6.
- Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Yustisia*, 3(2), 2014.
- Wati, Rani Yohana & Zulfiko, Riki, "Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI", *Jurnal Sumbang*, 2(2), 2024.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang Diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2076

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 257. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2041

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832

C. Internet

Alkostar, Artidjo. “Keadilan Restoratif”. <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com?page=all> (diakses pada 23 November 2023)

Amiati, Mia, “Prinsip Equality Before The Law Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”, pada <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>, diakses pada 26 September 2024.

BBC.com, “TNI berkeras dugaan korupsi Kabasarnas diadili di pengadilan militer”. pengamat: ‘ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu’, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>, (diakses pada 27 November 2023).

Hukum Online, “Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-sengkarut-penanganan-perkara-koneksitas-lt64ddca934dfb8/?page=1>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Indonesia Corruption Watch, “*In-Depth Analysis: Bakamla Bukti Lemahnya KPK Menjerat Aparat Militer*”, <https://antikorupsi.org/id/article/depth-analysis-bakamla-bukti-lemahnya-kpk-menjerat-aparat-militer>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/ranah>, diakses pada tanggal 26 September 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Artikel Pengkajian dan Pengembangan: Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas *Equality Before The Law*”. https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc (diakses pada 2 April 2024).

Kementerian Pertahanan RI, “2 ‘Senjata’ KPK untuk Tindak Anggota TNI Terkait Kasus Bakamla”, <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/19/2-senjata-kpk-untuk-tindak-anggota-tni-terkait-kasus-bakamla.html>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/itjen/inspektorat-keuangan#:~:text=Bendahara%20Khusus%20Bialugri%20adalah%20Pejabat,pengadaan%20barang%20Fjasa%20luar%20negeri>. Diakses pada tanggal 22 September 2024.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/01/03/kpk-apresiasi-pom-tni-yang-tersangkakan-laksma-bambang.html>, diakses pada tanggal 22 September 2024.

Kompas.com, “Kasus Korupsi Basarnas, Pengadaan Digital Diakali Lewat Persekongkolan”. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/09113631/kasus-korupsi-basarnas-pengadaan-digital-diakali-lewat-persekongkolan?page=all#page2> (diakses pada 27 November 2023).

Kurniawan, Aris. “*Sejarah Tentara Nasional Indonesia*”. <http://www.gurupendidikan.com/sejarah-terbentuknya-tentara-nasional-indonesia-menurut-ahli-sejarah/>, (diakses pada 29 Mei 2024).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Menelisik Peran Jaksa Agung Muda Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana

Korupsi”, <https://testing.mkri.id/berita/menelisk-peran-jaksa-agung-muda-militer-dalam-penanganan-perkara-koneksitas-tindak-pidana-korupsi-21249>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024.

Muhadam, “Tertib Sipil vs Militer, Pelajaran Basarnas”, <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1952#:~:text=Artinya%2C%20Basarnas%20adalah%20organ%20sipil,pencarian%20dan%20pertolongan%20bagi%20masyarakat>, diakses pada 2 Oktober 2024.

Nababan, Willy Medi Christian, 2023. “Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi Tantangan.” Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/05/-revisi-uu-peradilan-militer-dipastikan-akan-meng-hadapi-tantangan>. Diakses pada 24 September 2024.

Pusat Penerangan TNI, “Sejarah TNI”, <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, (diakses pada 30 Mei 2023).

Pusat Penerangan TNI, “Peran Fungsi dan Tugas TNI”, <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> (diakses pada 30 Mei 2023).

Saptohutomo, Aryo Putranto, “Kasus Korupsi Basarnas, Pengadaan Digital Diakali Lewat Persekongkolan”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/09113631/kasus-korupsi-basarnas-pengadaan-digital-diakali-lewat-persekongkolan?page=all#page2>. (diakses pada 27 November 2023)

D. Penulisan Akhir

Akbar, Ahmad Fattahilla. “Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

Dewi, Vania Oktaviani dan Irwan Triadi. “Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil”, Penelitian Hukum, Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2023.

Fitri, Sri Devi Annisa, 2017, “Gagasan Perluasan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

J., Dewi Bella. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota

Tentara Nasional Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Jamaludin, Ahamd. “Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, Penelitian Hukum, Univeritas Islam Nusantara, 2024.

Mahasena, Adhyaksa, 2015, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Pengaturan Kejahatan terhadap Data Elektronik”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Tappangan, Louis S.E. “Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Pelaku Anggota Militer”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.